

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang sebagai sebuah kelompok kepentingan yang berinstitusi keagamaan yang melembaga secara formal, dan memiliki jaringan organisasi yang kuat serta keanggotaan yang bersifat resmi memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada umat atas dasar tanggungjawab sebagai sebuah kelompok kepentingan. Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik dilakukan dengan memanfaatkan jaringannya baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung langkahnya. Secara internal Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang menggunakan kekuatan hirarkisnya untuk menyatukan komitmen melalui konsolidasi yang dibangun diantara para imam dan kaum religius (biarawan-biarawati), mengoptimalkan peran Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik dan WKRI, serta menggunakan PK3 Paroki sebagai jembatan PK4AS dalam melakukan pendidikan politik kepada umat katolik. Sementara secara eksternal, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang melakukan peranannya dengan menggandeng KPU dan Bawaslu dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya.

Dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang juga melakukan beberapa strategi dan bentuk pendidikan politik seperti memanfaatkan jejaring media sosial berupa Instagram Bapa Uskup dan youtube komsos keuskupan, melalui media cetak salam damai, melakukan pendataan dan pendampingan kepada caleg katolik dan katekese politik/pengajaran iman. Sementara bentuk pendidikan politik berupa temu pastoral, konsolidasi gereja katolik, diskusi dan seminar serta penyebaran surat gembala. Secara umum sebagai sebuah kelompok kepentingan, Gereja Katolik Keuskupan Agung

Semarang melalui PK4AS telah melakukan peranannya dalam melakukan pendidikan politik walaupun masih terdapat kendala yang dialami gereja katolik sendiri seperti sebagian umat yang kurang tertarik dan enggan untuk terlibat dalam sosialisasi politik yang dilakukan gereja katolik, dan minimnya keterlibatan kaum muda dalam pendidikan politik serta ketidaknetralan gereja katolik sebagai penyelenggara dalam pendidikan politik.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari analisis yang telah dilakukan, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya hendaknya memilih strategi dan bentuk yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, misalnya dengan konten-konten yang menarik sehingga keterlibatan umat dalam pendidikan politik semakin banyak dan diharapkan gereja katolik bersifat netral dengan tidak mengarahkan umat untuk memihak calon manapun, dengan demikian pendidikan politik kepada umat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepada peneliti berikutnya diharapkan mengkaji lebih dalam bagaimana peran pastor/romo dalam pendidikan politik.